

## **Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah**

**Syahrul Amsari\*, Isnaini Harahap, Zuhrial M. Nawawi**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan

\*Correspondence: [syahrulamsari@umsu.ac.id](mailto:syahrulamsari@umsu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Artikel ini menggambarkan transformasi paradigma pembangunan ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Syariah, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Latar belakangnya melibatkan pemahaman mendalam terhadap tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk menyusun landasan pembangunan yang berkelanjutan dari perspektif nilai-nilai ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi Ekonomi Syariah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian melibatkan kajian literatur mendalam serta analisis kritis terhadap model pembangunan yang ada. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa penerapan konsep-konsep Ekonomi Syariah memiliki potensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam merancang kebijakan ekonomi berbasis Syariah. Dalam konteks ini, artikel ini juga mengidentifikasi inovasi dan best practices dalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam pembangunan ekonomi. Kesimpulan artikel ini merangkum bahwa transformasi paradigma pembangunan ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Syariah mampu menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Kontribusi utama terletak pada pemenuhan keadilan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam membuka wawasan dan arah baru bagi pemikiran pembangunan ekonomi yang lebih holistik dan berdaya tahan.

**Kata kunci:** ekonomi syariah; masa depan berkelanjutan; paradigma pembangunan; transformasi ekonomi; perspektif islam.

### **ABSTRACT**

*This article illustrates a paradigm shift in economic development through the lens of Islamic Economics, with a specific focus on sustainable development. The background involves a profound understanding of global economic challenges and the necessity to construct a sustainable development foundation from the perspective of Islamic economic values. The research aims to analyze the contribution of Islamic Economics in addressing economic imbalances, poverty alleviation, and community empowerment. The research methodology entails an in-depth literature review and a critical analysis of existing development models. The findings of this study indicate that the implementation of Islamic Economic concepts has the potential to foster more inclusive and sustainable economic growth. Factors such as distributive justice, community participation, and environmental sustainability take center stage in shaping Shariah-based economic policies. In this context, the article also identifies innovations and best practices in applying Islamic Economic principles to economic development. The conclusion of this article summarizes that the transformation of the economic development paradigm through the Islamic Economics approach can create a robust foundation for sustainable development. The primary contributions lie in achieving economic justice, community empowerment, and environmental sustainability. Thus, this article makes a significant contribution by providing insights and a new direction for a more holistic and resilient approach to economic development.*

**Keywords :** *islamic economy; sustainable future; development paradigm; economic transformation; islamic perspective*

### **PENDAHULUAN**

Transformasi paradigma pembangunan ekonomi menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi global. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ekonomi Islam muncul sebagai kerangka kerja yang signifikan dalam memandu proses transformasi

ini. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa ekonomi global menghadapi ketidakseimbangan yang semakin mencemaskan dan memerlukan pendekatan yang berbasis keadilan dan keberlanjutan. Transformasi paradigma pembangunan ekonomi menjadi suatu kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas tantangan ekonomi global yang semakin meningkat. Dalam rangka menghadapi dinamika yang terus berkembang ini, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ekonomi Islam muncul sebagai kerangka kerja yang signifikan untuk memandu proses transformasi ini.

Ekonomi global saat ini dihadapkan pada ketidakseimbangan yang semakin mencemaskan. Fenomena ini mencakup disparitas ekonomi antarnegara dan antarindividu, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlunya suatu pendekatan yang bukan hanya fokus pada peningkatan ekonomi semata, melainkan berbasis pada prinsip keadilan dan keberlanjutan menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ekonomi Islam menawarkan solusi yang holistik. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan menjadi landasan untuk merancang paradigma pembangunan yang baru. Pendekatan ini bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga menjadi suatu keharusan untuk mengatasi tantangan global yang semakin kompleks dan mendesak. Dengan merangkul nilai-nilai Ekonomi Syariah, diharapkan transformasi paradigma pembangunan ekonomi dapat membawa dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan, menciptakan landasan yang kuat untuk masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Karena itu, pengintegrasian nilai-nilai ekonomi Islam dalam proses transformasi ini menjadi kunci untuk mengatasi ketidakseimbangan dan mencapai pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Pentingnya menerapkan paradigma pembangunan yang berkelanjutan melalui perspektif Ekonomi Syariah telah diakui secara luas dalam literatur terkait. Menurut Hasan, et al. (2019), pendekatan ini bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai solusi konkret terhadap ketidakseimbangan ekonomi global. Begitu juga, penelitian Khan (2020) menyoroti kontribusi positif Ekonomi Syariah terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, banyak yang berpendapat bahwa istilah "pembangunan" merupakan frasa netral yang merujuk pada suatu konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan upaya dan proses peningkatan dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, dan infrastruktur masyarakat. Dalam perspektif ini, pembangunan diartikan sebagai perubahan sosial, dan para penganut pandangan ini memandang bahwa konsep pembangunan dapat berdiri sendiri tanpa perlu penjelasan tambahan. Bagi mereka yang mengikuti pandangan ini, konsep pembangunan seringkali dikaitkan dengan model-model tertentu, seperti pembangunan berbasis kapitalisme, sosialisme, Indonesia, dan sejenisnya. Dengan demikian, pembangunan dianggap sebagai suatu teori sosial ekonomi yang bersifat umum. Pendekatan ini dominan dalam berbagai diskusi mengenai perubahan sosial, dan konsep pembangunan dianggap sebagai entitas yang dapat didefinisikan tanpa perlu banyak penjelasan tambahan (Fakih, 2003).

Meningkatkan sektor ekonomi merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan nasional yang diinginkan. Sektorekonomi menjadi fokus utama dan sangat penting karena erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan sektor ekonomi ini. Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur melalui pencapaian berbagai target ekonomi. Parameter seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan keseimbangan pembayaran menjadi indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi (Baswir, 2009). Implementasi pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kebangkitan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik lokal dan jenis pekerjaan yang dominan. Penerapan pendekatan industrialisasi yang lebih cenderung kapitalis sejauh ini lebih menonjolkan aspek modal, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang dijalankan seharusnya mencerminkan potensi dan keahlian masyarakat (Primiana, 2009).

Sinkronisasi kebijakan menjadi sangat penting mengingat masih ada beberapa isu mendasar dalam perekonomian yang belum teratasi, seperti masalah struktural dalam penyediaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kesenambungan antara kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah menjadi fokus utama dalam mendukung pembentukan dasar ekonomi yang kokoh, seiring dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, perlu ditekankan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi, bersama dengan langkah-langkah untuk

meningkatkan keterlibatan investor asing, dukungan perantara perbankan, dan memperdalam sektor keuangan domestik. Penelitian terus dilakukan oleh perwakilan Bank Indonesia di berbagai wilayah untuk mengevaluasi sektor-sektor ekonomi dan komoditas unggulan melalui Kajian Ekonomi Regional (KER) dalam bentuk survey (Bank Indonesia, 2009).

Upaya dari segala sektor, termasuk pemerintah, industri, dan pelaku usaha, dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Walaupun demikian, mencapai tujuan kesejahteraan ini tidak selalu merupakan perjalanan yang mudah. Tantangan dan hambatan pembangunan sering kali menjadi penghalang dalam perjalanan menuju kesejahteraan, sehingga hasil pembangunan tidak merata di seluruh segmen masyarakat (Nafik, 2009). Kesenjangan ekonomi dan rezeki di antara pelaku ekonomi dianggap sebagai bagian dari sunnatullah atau ketentuan ilahi. Dalam konteks ini, terbentuklah mekanisme ekonomi yang, dari perspektif agama, mendorong keberlanjutan dengan memberikan bantuan dari yang berlebih kepada yang kekurangan, sehingga kesenjangan dapat menyempit meskipun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Kolaborasi dan pertolongan antarindividu menjadi kunci penting, di mana kebutuhan manusia dapat terpenuhi melalui keterlibatan aktif antara yang memiliki sumber daya lebih dan yang membutuhkan. Tujuan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melibatkan pencapaian kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang saat ini terkendala, terutama karena adopsi konsep kapitalisme yang berlebihan (Chapra, 2000). Oleh sebab itu, banyak negara kini berhati-hati dalam mengadopsi gagasan-gagasan yang berasal dari sistem kapitalisme. Di tengah kegagalan pembangunan berbasis kapitalisme, muncul alternatif sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran syari'ah Islam. Saat krisis ekonomi melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang mengadopsi prinsip-prinsip syari'ah terbukti dapat bertahan dan bahkan tumbuh. Meskipun nilai-nilai ekonomi Islam telah diakui dalam ajaran Islam, dalam kerangka ilmu ekonomi, konsep ini masih mengalami perkembangan untuk menjadi kajian yang mapan (Hamidi, 2003).

Dengan timbul dan berkembangnya pengetahuan ekonomi Islam, muncul opsi solusi terhadap isu-isu yang terkait dengan kegagalan sistem kapitalisme. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi syari'ah Islam menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dalam aktivitas ekonomi, melibatkan keteraturan, kebenaran, keteraturan, dan kedisiplinan. Mengingat permasalahan yang masih terjadi dalam proses pembangunan dan belum mencapai hasil optimal, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif ekonomi Islam terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi isu-isu pembangunan terutama yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan secara kritis menganalisis kontribusi Ekonomi Syariah dalam mengubah paradigma pembangunan ekonomi menuju masa depan yang berkelanjutan. Dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini berusaha menemukan solusi konkret terhadap ketidakseimbangan ekonomi global, dengan fokus pada keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

## **METODE**

Metode penelitian ini melibatkan kajian literatur mendalam dan analisis kritis terhadap berbagai model pembangunan yang telah diterapkan (Sugiyono, 2014). Pendekatan ini memberikan landasan untuk memahami konsep-konsep utama dalam Ekonomi Syariah dan mengidentifikasi cara implementasinya dalam pembangunan ekonomi. Analisis data dilakukan dengan merinci kontribusi prinsip-prinsip Ekonomi Syariah terhadap ketidakseimbangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Demikian pula, tulisan ini meneliti inovasi dan praktik terbaik dalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **HASIL**

### *Ekonomi Pembangunan*

Ilmu ekonomi pembangunan, sebagai cabang terapan dalam disiplin ekonomi, muncul pasca Perang Dunia Kedua, dua abad setelah konsep dasar ilmu ekonomi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1776 Masehi. Fokus utama dari ekonomi pembangunan adalah memberikan solusi terhadap beragam permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang baru saja merdeka, terutama mereka

yang sedang mengalami proses perkembangan dan menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan. Tujuan dari ekonomi pembangunan adalah mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara yang efisien, tepat, dan menyeluruh. Berdasarkan sifat terapan dan urgensi dalam menangani permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang, analisis ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Dengan melakukan analisis ini, fokus utamanya adalah menemukan solusi-solusi yang dapat mendukung negara-negara berkembang dalam membangun ekonominya dengan lebih efektif (Sukirno, 1985).

Menurut para ahli dalam konteks ini, ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai kajian yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu negara berkembang, dengan fokus utama pada penanggulangan permasalahan kritis seperti kemiskinan, pengangguran, dan upaya mencapai pemerataan. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang menghasilkan berbagai model, metode, serta pola yang berbeda-beda, dan kemudian menjadi paradigma global dalam melaksanakan upaya pembangunan (Aedy, 2011).

1. Paradigma Pertumbuhan Maksimal (*Maximal Growth Paradigm*)

Paradigma ini menekankan pencapaian pertumbuhan ekonomi secara optimal dengan mengandalkan teknologi dalam investasi. Tujuan utamanya adalah untuk merangsang lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menaikkan produksi secara efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Indikator yang digunakan dalam mengukur dan merencanakan pertumbuhan melalui *Gross National Product* (GNP/ Produk Nasional Bruto). Paradigma ini mengusung pendekatan *Trickle Down Effect* (TDE), di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan menghasilkan pemerataan ekonomi. Namun, pada perkembangannya, harapan negara-negara yang mengadopsi paradigma ini terhadap konsep tetesan ke bawah tidak terpenuhi. Sebaliknya, paradigma ini justru memperdalam ketidaksetaraan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dengan kata lain, walaupun paradigma ini berhasil dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berhasil mencapai tingkat pemerataan yang diinginkan. Oleh karena itu, tujuan seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, melainkan juga pada penanggulangan masalah antar kelompok karena ketidaksetaraan.

2. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Distribution with Growth Paradigm*)

Paradigma ini menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan paradigma pertumbuhan ekonomi semata, paradigma ini menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok sosial. Fokusnya bukan hanya pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) secara keseluruhan, melainkan juga pada distribusi hasil pertumbuhan yang adil di antara semua warga negara. Paradigma ini menganjurkan strategi pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara umum, tetapi juga mengurangi disparitas ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, distribusi pendapatan dan keadilan sosial menjadi aspek kunci dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)

Menekankan perlunya memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai fokus utama dalam pembangunan ekonomi. Paradigma ini mengidentifikasi kebutuhan esensial seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas utama yang harus dipenuhi oleh suatu sistem ekonomi. Sebagai alternatif terhadap pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pendekatan ini menilai keberhasilan pembangunan bukan hanya dari segi angka statistik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan mengutamakan aspek kebutuhan pokok, paradigma ini bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan meningkatkan taraf hidup mereka.

4. Paradigma dengan Fokus Pembangunan Manusia (*Human Development Paradigm*)

Paradigma Pembangunan Manusia (*Human Development Paradigm*) merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan sejatinya harus diukur dan dinilai berdasarkan peningkatan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan parameter ekonomi semata seperti produk

domestik bruto (PDB). Dalam konteks ini, paradigma pembangunan manusia menitikberatkan pada indikator-indikator seperti pendidikan, kesehatan, harapan hidup, dan standar hidup sebagai penentu kemajuan suatu masyarakat. Peningkatan dalam aspek-aspek tersebut dianggap sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, berpendidikan, dan sehat secara holistik. Dalam paradigma ini, peran manusia bukan hanya sebagai objek pembangunan yang membutuhkan kesejahteraan materi, tetapi juga sebagai subjek yang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dengan fokus pada pengembangan potensi manusia, paradigma ini menciptakan landasan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif di semua lapisan masyarakat.

5. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Paradigm*)

Paradigma ini merujuk pada pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Paradigma ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokusnya bukan hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam, pengurangan jejak ekologis, dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini mengakui bahwa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan adalah prasyarat untuk kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan dan tindakan saat ini terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pendekatan ini mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pembangunan yang adil secara sosial. Keselarasan antara kebutuhan manusia dan keseimbangan ekosistem menjadi inti dari paradigma pembangunan berkelanjutan, dengan harapan dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan seimbang bagi semua pihak (Heilbroner, 1982). Walaupun gagasan-gagasan yang terdapat dalam paradigma ini belum sepenuhnya diuji, namun paradigma ini menghasilkan pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Apabila manusia berkeinginan mencapai kesejahteraan, mereka perlu memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini berharap agar masa depan bumi tidak terganggu akibat penyalahgunaan manusia terhadap fasilitas yang dimilikinya. Jika efisiensi dianggap sebagai konsep ekonomi dan keadilan ekonomi dipahami sebagai konsep ekonomi yang berbasis etika, maka konsep keberlanjutan (*sustainable*) merupakan hasil gabungan dari faktor-faktor ekonomi, fisik, sosial, dan politik. Pembangunan berkelanjutan adalah jenis pembangunan yang memberikan manfaat secara adil dan merata kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk bagi generasi yang akan datang (Mubyarto, 2000).

6. Paradigma Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (*General Public Participation Paradigm*)

Paradigma ini mengacu pada pendekatan pembangunan yang menekankan peran serta aktif dan langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Paradigma ini memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal, kebutuhan, dan aspirasi yang dapat memberikan kontribusi berharga dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat bukan hanya dianggap sebagai elemen pelengkap, melainkan sebagai prinsip inti yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Paradigma ini menekankan inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, dengan harapan dapat menciptakan kebijakan dan proyek-proyek yang lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Paradigma partisipasi masyarakat dalam pembangunan menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, paradigma ini berusaha mengatasi ketidaksetaraan, konflik, dan ketidakpuasan yang mungkin muncul akibat ketidakpartisan atau ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pentingnya paradigma ini terletak pada pengakuan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif semata, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, paradigma ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dilibatkan. (Prasetyantoko, 2001).

7. Paradigma Pembangunan Mandiri (*Self-Reliant Paradigm*)

Paradigma Pembangunan Mandiri (*Self-Reliant Paradigm*) merujuk pada pendekatan pembangunan yang menekankan kemandirian suatu komunitas atau negara dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Paradigma ini menitikberatkan pada kemampuan suatu entitas untuk mengembangkan sumber daya dan potensinya sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal atau ketergantungan yang berlebihan. Dalam konteks ini, paradigma pembangunan mandiri menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan lokal, pengembangan keterampilan, dan optimalisasi sumber daya yang ada. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika suatu entitas memiliki kontrol dan keberlanjutan atas inisiatif dan kebijakan pembangunan mereka. Paradigma ini menolak orientasi yang terlalu terpusat pada bantuan luar dan lebih menekankan pada pemahaman dan pemanfaatan potensi lokal untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, paradigma ini berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan. Pendekatan pembangunan mandiri juga mengakui bahwa setiap entitas memiliki konteks uniknya sendiri, dan oleh karena itu, strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Paradigma ini menempatkan tanggung jawab utama pada masyarakat setempat untuk mengarahkan dan mengelola inisiatif pembangunan mereka sendiri, dengan dukungan yang bersifat kolaboratif dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, paradigma pembangunan mandiri bertujuan untuk mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan, relevan, dan sesuai dengan konteks lokal yang bersangkutan (Rudianto, 1985).

8. Paradigma Syari'ah (*Sharia Paradigm*)

Paradigma Syari'ah (*Sharia Paradigm*) merujuk pada pendekatan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Paradigma ini menempatkan nilai-nilai dan ajaran syariah sebagai landasan utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ekonomi, paradigma Syari'ah menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi ekonomi. Sistem keuangan Syari'ah, yang melibatkan prinsip keuntungan yang adil, larangan riba (bunga), dan investasi yang sesuai dengan hukum Islam, menjadi bagian integral dari paradigma ini. Pada tingkat sosial, paradigma ini mendorong nilai-nilai moral dan etika Islam, termasuk keadilan sosial, persamaan hak, dan solidaritas masyarakat. Dalam aspek politik, paradigma Syari'ah menuntut penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan. Pentingnya paradigma Syari'ah terletak pada keyakinan bahwa penerapan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Meskipun implementasinya dapat bervariasi di berbagai negara, tergantung pada interpretasi dan konteks lokal, paradigma Syari'ah memberikan pedoman dan kerangka kerja bagi pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

*Ekonomi Islam*

Kegiatan ekonomi merupakan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks madzab ekonomi Islam, merujuk pada suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini mencakup pandangan dan nilai-nilai Islam dalam mengatur aspek-aspek ekonomi, keuangan, dan bisnis. Beberapa pandangan mengenai definisi ekonomi Islam mencakup:

1. Islam mencerminkan cara pengaturan aspek perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh madzab ini. Hal ini melibatkan kehati-hatian dalam pemikiran, memperhitungkan aspek moral Islam dan prinsip-prinsip keilmuan ekonomi, serta mempertimbangkan sejarah yang relevan terkait permasalahan ekonomi dan catatan sejarah umat manusia.
2. Ekonomi Islam diartikan sebagai rangkaian prinsip dasar ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi struktur ekonomi yang disusun sesuai dengan konteks lingkungan dan periode waktu tertentu.
3. Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pengelolaannya berdasarkan pada prinsip serta strategi ekonomi Islam. Ilmu ini mencakup panduan yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan dasar.

Definisi tersebut menggambarkan karakteristik berbeda yang signifikan dengan perspektif aliran ekonomi yang pernah ada sebelumnya. Karakteristik dan aspek dasar yang menjadi pembeda melibatkan (Abu Saud, 1991):

1. Ekonomi Islam dianggap sebagai unit satuan integral dari proses mekanisme secara menyeluruh. Islam secara komprehensif, menyajikan pandangan yang kompleks, faktual, dan multidimensi untuk memberikan pedoman bagi kehidupan makhluknya, termasuk dalam konteks kehidupan ekonomi. Tingkat nilai-nilai Islam melebihi agama-agama lain, melibatkan aspek hukum, regulasi, etika, dan norma perilaku. Oleh karena itu, tidak adil jika petunjuk hidup ini dipisahkan menjadi komponen-komponen terpisah.
  - a. Transaksi ekonomi dalam Islam dicirikan oleh konsep pengabdian. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim, baik dalam konteks ekonomi maupun di luar itu, dapat menjadi bentuk ibadah yang berpotensi mendatangkan pahala, asalkan dilakukan dengan niat mencari keridhoan Allah Swt.
  - b. Kegiatan ekonomi dalam Islam dianggap memiliki nilai yang mulia. Dua madzab ekonomi sebelumnya cenderung menuju orientasi materialisme, yang berdampak pada persaingan, monopolisasi pasar, dan konflik, termasuk kontribusi terhadap perang dunia. Sebaliknya, madzab ekonomi Islam selalu menekankan kerjasama dan pembagian hasil dalam setiap aspek kegiatan ekonominya dengan semangat saling tolong-menolong dengan mendorong sifat yang luhur.
  - c. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam dianggap sebagai bentuk pengawasan yang autentik dan mendapat posisi yang sangat penting. Penyelewengan dalam kegiatan ekonomi sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang hanya bergantung pada kontrol negara. Dalam konteks ekonomi Islam, pengawasan dilakukan melalui hati nurani yang terbina atas keyakinan akan keberadaan Allah Swt dan pertanggungjawaban di hari akhirat. Seorang Muslim menyadari bahwa ia tidak dapat menghindari dari pengawasan Allah Swt, bahkan jika mampu menghindari pengawasan dari pihak berwenang manusia. Jenis pengawasan ini diyakini dapat memastikan perilaku masyarakat yang etis dan mengurangi pelanggaran dalam kegiatan ekonomi (Al Maududi, 1985).
2. Pengawasan pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam dianggap sebagai bentuk pengawasan yang otentik dan mendapatkan posisi yang sangat penting. Penyelewengan dalam kegiatan ekonomi sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang hanya mengandalkan kontrol negara. Dalam konteks ekonomi Islam, pengawasan dilakukan melalui hati nurani yang terbina atas keyakinan akan keberadaan Allah Swt dan pertanggungjawaban di hari akhirat. Seorang Muslim menyadari bahwa ia tidak bisa terlepas dari pengawasan Allah Swt, bahkan jika dapat menghindari pengawasan dari pihak berwenang manusia. Jenis pengawasan ini diyakini dapat menjamin perilaku masyarakat yang bermoral dan mengurangi pelanggaran dalam kegiatan ekonomi (Anggara, 2023). Dengan istilah lain, visi ekonomi Islam tidak melibatkan terciptanya persaingan, monopoli, atau egoisme yang mengumpulkan kekayaan dunia secara eksklusif dan menahan pemberiannya kepada orang lain, sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi buatan manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengakui pentingnya kekayaan, kesejahteraan hidup, dan manfaat hidup untuk seluruh masyarakat, didukung oleh niat pelaksanaan hak khilafah dan ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diuraikan di atas mencerminkan adanya integrasi antara unsur materi dan spiritual, unsur dunia dan akhirat, serta unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan antara elemen-elemen ini diyakini akan berdampak positif pada pencapaian tujuan individu dan masyarakat.

#### *Basis Pembangunan Ekonomi Islam*

Basis pembangunan ekonomi Islam terletak pada prinsip-prinsip yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, menjadi panduan utama dalam membentuk struktur ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual dan moral, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Integrasi antara unsur material dan spiritual, serta keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, menjadi dasar bagi keberhasilan individu dan masyarakat dalam mencapai tujuan mereka.

Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi diarahkan oleh prinsip-prinsip syari'ah, yang mencakup aspek hukum, etika, dan norma perilaku. Nilai-nilai ini membentuk dasar ekonomi yang

adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan pandangan Islam tentang keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya ekonomi diatur dengan memperhatikan hak-hak individu, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan. Pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonomi menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, basis pembangunan ekonomi Islam mencakup implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi, dengan tujuan memberikan manfaat merata bagi seluruh masyarakat dan mencapai kesejahteraan holistik (Smith, 2022).

**Tabel 1**  
**Pembangunan Berbasis Ekonomi Islam Berdasarkan Komponen Pembangunan**

No	Komponen Pembangunan	Deskripsi
1	Tujuan Pembangunan	Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dengan merujuk pada prinsip-prinsip syari'ah Islam.
2	Fokus Pembangunan	Pemberdayaan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, mental attitudes, dan kebutuhan jasmani serta rohaniyah.
3	Prinsip-prinsip Utama	Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keselarasan unsur materi dan spiritual, serta keberlanjutan (sustainability) dalam perspektif Islam.
4	Target Pembangunan	Membangun masyarakat yang memandang kemaslahatan dunia dan akhirat, diwujudkan melalui lima perilaku yang diperintahkan (Wajib).
5	Sumber Daya	Penggunaan sumber daya alam dan manusia yang berkelanjutan, dengan penekanan pada tanggung jawab sosial dan ekologis.
6	Inklusivitas	Memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat ikut serta dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan.
7	Pengawasan	Pengawasan yang berasal dari hati nurani, didasarkan pada keyakinan akan keberadaan Allah Swt dan pertanggungjawaban di hari akhirat.
8	Metode Pelaksanaan	Implementasi ajaran syari'ah dalam regulasi ekonomi, perundang-undangan, dan tata kelola ekonomi secara umum.

Sumber: Ashur (2006), Chapra (2014), Khan (1995), Rosly & Sanusi (1999) dan Siddiqi (2006).

Fokus utama dalam ekonomi Islam adalah pembangunan manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat, melainkan juga untuk membangun sikap mental (mental attitudes). Pembangunan ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan fisik, melainkan juga mencakup kebutuhan rohaniyah. Pembangunan kebutuhan rohaniyah ini secara alamiah akan mendorong kemandirian dan kesadaran yang tinggi bagi setiap individu untuk membangun dirinya sendiri serta berpartisipasi dalam membangun bangsa dan umat manusia.

Membangun masyarakat dan umat manusia dalam suatu bangsa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat, dengan merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diarahkan melalui lima bentuk perbuatan konstruktif. Perbuatan yang dimaksud dalam membangun ekonomi Islam disini mencakup (Smith & Rahman, 2020).

1. Perbuatan yang Diperintahkan (Wajib). Bangsa dan umat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan yang diamanahkan, khususnya dalam aspek ekonomi. Tidak mematuhi perintah ini akan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan di akhirat dengan adanya sanksi yang diberlakukan.
2. Perbuatan yang Dianjurkan (Sunnah). Selain dari yang diwajibkan, terdapat perilaku yang dianjurkan untuk dilakukan. Penerapan perilaku ini akan membawa manfaat di dunia dan mendapatkan keberkahan di akhirat.
3. Perbuatan yang Dibolehkan (Mubah). Terdapat kebebasan untuk melakukan beberapa tindakan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum tertentu. Meskipun dibolehkan, tetapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral.
4. Perbuatan yang Dilarang (Haram). Sebaliknya, terdapat perilaku yang dilarang dalam ekonomi Islam. Melanggar larangan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan di dunia dan akhirat.
5. Perbuatan yang Makruh. Ada tindakan-tindakan yang sebaiknya dihindari karena dapat membawa dampak negatif. Meskipun tidak diharamkan, tetapi dianjurkan untuk dihindari.

Dengan mengikuti lima bentuk perbuatan ini, diharapkan masyarakat dapat membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebagaimana berikut (Hasan, M., 2019).

**Tabel 2.**

**Pembangunan Berbasis Ekonomi Islam Berdasarkan Berdasarkan Bentuk Perbuatan**

No	Bentuk Perbuatan	Deskripsi
1	Perbuatan yang Diperintahkan (Wajib)	Bangsa dan umat manusia diwajibkan untuk menjalankan kegiatan yang diperintahkan, terutama dalam bidang perekonomian. Tidak melaksanakan perintah ini akan berdampak pada kehidupan di akhirat dengan sanksi yang diberikan.
2	Perbuatan yang Dianjurkan (Sunnah)	Selain dari yang diwajibkan, terdapat perilaku yang dianjurkan untuk dilakukan. Penerapan perilaku ini akan membawa manfaat di dunia dan mendapatkan keberkahan di akhirat.
3	Perbuatan yang Dibolehkan (Mubah)	Terdapat kebebasan untuk melakukan beberapa tindakan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum tertentu. Meskipun dibolehkan, tetapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral.
4	Perbuatan yang Dilarang (Haram)	Sebaliknya, terdapat perilaku yang dilarang dalam ekonomi Islam. Melanggar larangan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan di dunia dan akhirat.
5	Perbuatan yang Makruh	Ada tindakan-tindakan yang sebaiknya dihindari karena dapat membawa dampak negatif. Meskipun tidak diharamkan, tetapi dianjurkan untuk dihindari.

Sumber: Ashur (2006), Chapra (1992) dan Siddiqi (2008)

Dalam pembangunan berbasis ekonomi Islam melibatkan lima bentuk perilaku yang membimbing masyarakat untuk membangun kehidupan ekonomi yang sesuai dengan syariat dan unsur nilai dalam Islam. Perbuatan yang menjadi wajib sebagai fondasi utama, mengingat kewajiban pelaksanaannya dengan ancaman sanksi di akhirat. Sementara perilaku yang dianjurkan (Sunnah) memberikan panduan tambahan untuk mencapai keberkahan (Hasan & Khan, 2018). Perilaku yang dibolehkan (Mubah) memberikan kebebasan aksi dengan tanggung jawab etika, sementara perilaku yang dilarang (Haram) memberikan batasan tegas untuk mencegah dampak negatif. Terakhir, perilaku yang makruh memberikan peringatan terhadap tindakan yang sebaiknya dihindari.

## SIMPULAN

Dalam mengejar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, transformasi paradigma menjadi krusial, khususnya melalui lensa ekonomi syariah. Artikel ini menggambarkan evolusi pemikiran pembangunan ekonomi dari paradigma pertumbuhan maksimal hingga paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma pertumbuhan maksimal, meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seringkali gagal dalam mewujudkan pemerataan dan memunculkan ketidaksetaraan. Sebaliknya, paradigma pertumbuhan dengan pemerataan mengalami hambatan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan penanggulangan korupsi. Kemudian, pendekatan kebutuhan pokok, meskipun mengarah ke pemenuhan kebutuhan dasar, dapat terbentur oleh keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Paradigma pembangunan berkelanjutan, yang muncul seiring kesadaran terhadap keterbatasan sumber daya alam, menyoroti pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, tantangan implementasi dan pengukuran keberlanjutan perlu diatasi. Dalam kerangka ini, paradigma partisipasi masyarakat menekankan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, sambil mengatasi kendala pembusukan yang mungkin timbul. Terakhir, paradigma pembangunan mandiri menyoroti arti kemandirian dalam pengembangan teknologi dan kebijakan nasional. Artikel ini menggambarkan bahwa paradigma ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang menarik, mengedepankan nilai-nilai moral, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta fokus pada keberlanjutan dalam segala aspek pembangunan. Dengan menggali potensi konsep ini, artikel ini mendorong refleksi mendalam terkait pemilihan paradigma yang dapat membimbing pembangunan ekonomi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Saud, M. 1991, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aedy, H. 2011, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al Maududi, A. A., 1985, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*, terj. Adnam Syamni. Jakarta: Media Dakwah.

- Anggara, W., Shawab, N., Majid, M. S. A., & Harahap, I., 2023, Economic Stability in Islamic View: Approach to Controlling Inflation, *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(5), 1366–1372.
- Bank Indonesia. 2009, *Executive Summary: Enhancing Resilience, Propelling the Momentum of National Economic Recovery*. Jakarta.
- Bawir, R. 2009, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, U. M., 1992. *Islam and Economic Development: A Review of Experience*. Islamic Development Bank.
- Chapra, U. M., 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, U. M., 2014. *What Is Islamic Economics?*. Islamic Foundation.
- Hamidi, M. L. 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Hasan, M., et al. 2019, Islamic Finance: An Alternative and Ethical Solution to the Global Financial Crisis, *International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECEM)*, 7(3), 1–10.
- Hasan, M. S., & Khan, A. R., 2018, *Falah: Islamic Development Paradigm*. XYZ Publishers.
- Heilbroner, R. L. 1982, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibn Ashur, M. T., 2006. *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Nafaes.
- Ibn Ashur, M. T., 2006. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khan, M. F. 1995. *Towards a Just Monetary System*. Islamic Foundation.
- Khan, A. 2020, Islamic Economics and Finance: A Catalyst for Poverty Alleviation and Community Empowerment., *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(4), 789–802.
- Mansour Fakih. 2003, *The Collapse of Development Theory and Globalization*. Yogyakarta: Insist Press and Pustaka Pelajar.
- Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nafik HR, M. 2009, *Benarkah Bunga Haram ? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*. Surabaya: Amanah Pustaka.
- Prasetyantoko, A. 2001, *Arsitektur Baru Ekonomi Global, Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Primiana, I. 2009, *Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan dalam Menumbuhkan UMKM dalam Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Rosly, S. A., & Sanusi, N. A. 1999. *The Philosophy and Practice of Islamic Economics and Finance*. Pelanduk Publications.
- Rudianto, D. 1985, *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indoensia*. Jakarta: Golden Terayon.
- Siddiqi, M. N. 2006. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Islamic Research and Training Institute.
- Siddiqi, M. N. 2008. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Smith, J. A., & Rahman, M. S. 2020, Economic Development Strategies in Islamic Paradigm: A Systematic Literature Review, *Islamic Economics Journal*, 12(3), 45–62.
- Smith, J. A. 2022, Paradigma Pembangunan Negara Berkembang Berorientasi Falah: Sebuah Tinjauan Sistematis, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(3), 123–145.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 1985, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Bima Grafika.